

## **HUBUNGAN ANTARA KINERJA KELEMBAGAAN DENGAN KERAGAAN SISTEM AGRIBISNIS PADA PERUSAHAAN INTI RAKYAT PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**

*(The Correlation Between The Institution and Its Agribusiness System Performance of Nucleus Estate Smallholder of Palm)*

**Juraemi**

*Program Studi Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman, Samarinda 75123  
Telp : (0541) 749130 ; Email : [sosek-unmul@cbn.net.id](mailto:sosek-unmul@cbn.net.id)*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research was study the correlation between the institution and agribusiness system performance of the palm farmer involved in the scheme of nucleus estate smallholder in Pasir district. The result of this study showed that there were four institutions which determine agribusiness system performance of the palm farmer involved in the scheme of nucleus estate smallholder in Pasir district. They were farmer's group, Koperasi Unit Desa (KUD), penyuluh lapangan (PPL) of estate and supervisor of nucleus estate. Performance of farmer's group were still inconclusive to support the existence of agribusiness system. Where as others institutions were conducive. Based on rank correlation analysis showed that productivity of institutions have significant correlation with existence of agribusiness system.*

**Keywords :** performance of institution, existence of agribusiness system.

### **I. PENDAHULUAN**

Kebijakan pengembangan agribisnis di Indonesia merupakan kelanjutan dari strategi jangka panjang pembangunan pertanian. Namun pada kenyataannya selama ini usaha pertanian cenderung berkembang hanya pada *on farm* yaitu berupa kegiatan produksi/ budidaya, dan kurang memperhatikan pengembangan pada *off farm* (kegiatan yang mendukung kegiatan budidaya). Karena itu keikutsertaan dan dukungan dari kegiatan/ faktor lainnya sangat diperlukan agar komoditas pertanian yang dihasilkan berdayasaing dan mampu eksis di pasaran.

Perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN yang diusahakan oleh petani plasma merupakan salah satu usaha agribisnis. Aktivitas dari usaha itu sudah tentu memerlukan dukungan tidak hanya terbatas pada proses produksi/ budidaya saja, tetapi dukungan faktor-faktor lain yang berkaitan dengan usaha bersangkutan. Banyaknya faktor yang terkait dengan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat maka usaha itu merupakan sebuah sistem yang disebut dengan sistem agribisnis. Menurut Saragih dan Krisnamurthi (1993) di dalam agribisnis terdapat dua konsep pokok, yakni sebagai suatu sistem yang integratif dan sebagai bisnis. Sebagai suatu sistem, agribisnis terdiri dari beberapa subsistem. Sebagai suatu bisnis, agribisnis mengacu kepada kegiatan pertanian

yang dijalankan dengan prinsip-prinsip bisnis. Dilain pihak, Pakpahan (1990) menyatakan bahwa secara konseptual kelembagaan dalam sistem agribisnis mengandung dua makna, yaitu kelembagaan sebagai aturan main (*rules of the games*) dan kelembagaan sebagai organisasi. Sebagai aturan main, kelembagaan merupakan sistem organisasi, dan sebagai organisasi kelembagaan diartikan sebagai wadah/ badan yang membuat aturan main. Berdasarkan pendapat tersebut, maka untuk menganalisis sistem agribisnis dapat dilakukan melalui pendekatan teori sistem.

Tujuan dari implementasi sistem agribisnis pada usaha perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN tidak lain adalah untuk meningkatkan keragaan usaha tersebut yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Karena itu pada batas-batas tertentu baik kondisi di sekitar petani, keterlibatan maupun kemampuan petani terhadap kegiatan-kegiatan selain kegiatan produksi/ budidaya tanaman kelapa sawit sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan usaha perkebunannya. Hal ini dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu sistem agribisnis kelapa sawit yang baik diperlukan keterlibatan berbagai subsistem, dan salah satunya adalah subsistem kelembagaan. Karena itu, kelembagaan sebagai salah satu subsistem tentunya mempunyai kontribusi tersendiri bagi

terbentuknya keragaan sistem agribisnis. Berkaitan dengan kontribusi subsistem terhadap sistemnya, Nisjar dan Winardi (1997) menyatakan bahwa timbulnya efek sinergistik dari berbagai subsistem menyebabkan keseluruhan melebihi jumlah dari bagian-bagiannya, sehingga kontribusi dari suatu subsistem dalam membentuk keragaan sistemnya dapat dipelajari.

Sebagai sebuah organisasi, kelembagaan merupakan wadah yang membuat aturan main. Sehubungan dengan hal itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa berusahatani hanya bisa berhasil apabila ditunjang oleh perangkat kelembagaan yang terkait. Ada beberapa kelembagaan yang aktivitasnya berkaitan dengan usaha perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN. Berbagai aktivitas kelembagaan dan keterlibatan petani pada lembaga itu diyakini dapat menentukan keragaan pada usaha tersebut. Kelembagaan yang dimaksud antara lain : Kelompok Tani, Koperasi Unit Desa (KUD), Lembaga Penyuluhan (PPL-BUN), dan Lembaga Pembinaan dari Perusahaan Inti.

Seperti disebutkan di atas bahwa keberhasilan usaha agribisnis yang dilakukan oleh petani memerlukan dukungan kelembagaan. Keberhasilan kelembagaan itu tidak hanya ditentukan oleh peran kelembagaan itu saja, tetapi juga memerlukan keterlibatan para petani secara aktif dalam kelembagaan bersangkutan. Jika peran kelembagaan dan keterlibatan petani belum optimal, maka kinerja kelembagaan sebagai salah satu subsistem sulit diharapkan dukungannya dalam membentuk keragaan sistem agribisnis yang kondusif. Keragaan sistem agribisnis yang kurang kondusif bukan saja menyebabkan rendahnya produktivitas dan hasil produksi, tetapi juga menyebabkan rendahnya pendapatan petani. Sayangnya penelitian secara komprehensif ke arah sana, khususnya di Kabupaten Pasir belum pernah dilakukan.

Penelitian ini bertujuan (1) melakukan identifikasi berbagai kelembagaan yang berperan dalam usaha perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN, (2) mengetahui unsur-unsur kelembagaan dalam membentuk kinerja masing-masing lembaga, dan (3) mengetahui besarnya peran kelembagaan dalam membentuk keragaan sistem agribisnis pada usaha yang bersangkutan.

## II. METODE PENELITIAN

Pengambilan sampel dilakukan dengan membagi populasi ke dalam wilayah dan mengambil sampelnya dari wilayah tersebut. (Tabel 1) Pengambilan sampel yang demikian menggunakan metode *cluster sampling*. Menurut Singarimbun dan Effendi (1989), *cluster sampling* adalah menggolongkan unit-unit populasi ke dalam gugus-gugus yang disebut *cluster*, dan ini merupakan satuan-satuan dari mana sampel akan diambil.

Penentuan jumlah sampel dari populasinya dihitung berdasarkan rumus yang dikemukakan oleh Yamane (1967), yaitu :

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

d<sup>2</sup> = presisi yang dikehendaki

Jumlah petani kelapa sawit pola PIR-BUN di ke-6 desa terpilih sebanyak 2.972 kepala keluarga petani, dan dengan menggunakan rumus penentuan jumlah sampel, maka jumlah petani sampel dengan tingkat presisi sebesar 10 %, yaitu 97.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah petani kelapa sawit pola PIR-BUN yang dijadikan sampel penelitian sebanyak 97 kepala keluarga petani plasma. Di samping itu, penentuan jumlah petani plasma di tiap desa terpilih dilakukan secara proporsional. Menurut Al-Rasjid (1988), alokasi proporsional tersebut adalah :

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

keterangan :

n<sub>i</sub> = jumlah petani sampel dari desa terpilih ke-i.

N<sub>i</sub> = jumlah seluruh petani sampel dari desa terpilih ke-i.

N = jumlah petani seluruh desa terpilih.

n = jumlah petani sampel semua desa terpilih.

Tabel 1. Jumlah petani sampel di tiap desa terpilih.

No	D e s a	Jumlah Petani	Jumlah Sampel
1.	Kelato SP I	500	17
2.	Kelato SP II	500	17
3.	Tajur	723	24
4.	Pait I	450	15
5.	Lolo	404	13
6.	Rangan Barat I	350	11
Jumlah		2.927	97

Ada dua alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis uji statistik inferensial. Data yang digunakan pada analisis deskriptif adalah data skoring yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Berdasarkan analisis tersebut diketahui kinerja (*performance*) kelembagaan pada usaha perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN, sedangkan kinerjanya dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya skor kenyataan (hasil penelitian) dengan skor harapan tertinggi dari unsur-unsur yang terkait dengan kelembagaan. Apabila skor kenyataan semakin mendekati skor harapan tertinggi, maka kinerja kelembagaan dalam membentuk keragaan sistem agribisnis di tingkat petani semakin kondusif.

Analisis kedua adalah analisis uji statistik inferensial yaitu analisis Koefisien Korelasi Rank Kendal ( $\tau$ ). Menurut Saleh (1985) Koefisien Korelasi Rank Kendal adalah analisis yang dapat digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya, dan asumsi dari normalitas distribusinya dapat diabaikan. Selain itu, analisis ini cocok sebagai ukuran korelasi/hubungan dengan jenis data sekurang-kurangnya mempunyai skala ukur ordinal antara variabel-variabel X dan Y. Nilai  $\tau$  yang diperoleh menunjukkan hubungan antara dua variabel (X dan Y) (Siegel, 1994). Berdasarkan analisis tersebut diketahui apakah ada hubungan yang signifikan antara kinerja kelembagaan dengan keragaan sistem agribisnis di tingkat petani..

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Unsur-unsur yang Menentukan Kinerja Kelembagaan

##### 1. Kelembagaan Kelompok Tani

Hasil analisis deskriptif terhadap kinerja kelembagaan Kelompok Tani pada perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN di Kabupaten Pasir, penilaiannya dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan katagori penilaian, maka data yang ada pada Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa kinerja kelembagaan kelompok tani pada perkebunan kelapa sawit rakyat di lokasi penelitian termasuk katagori kurang baik. Katagori yang demikian juga dapat dilihat dari besarnya persentase antara total skor NK dengan total skor NHTT dalam arti peran kinerja kelembagaan kelompok tani dalam membentuk keragaan sistem agribisnis adalah sebesar 51,48%.

Ada 3 unsur kelembagaan kelompok tani yang kondisinya masih lemah dalam membentuk kinerja kelembagaan bersangkutan. Unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Unsur kerjasama anggota kelompok tani dalam penyediaan *input*/saproton. Rendahnya kerjasama petani dalam penyediaan saproton disebabkan tidak semua petani memiliki uang kontan pada saat yang bersamaan untuk melakukan pembelian *input* pertanian, selain kurangnya koordinasi antara anggota dengan pengurus kelompok. Kondisi ini menyebabkan pemberian *input* kepada tanaman cenderung tidak sesuai dengan yang dianjurkan.

Tabel 2. Penilaian kinerja kelembagaan kelompok tani pada perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN di lokasi penelitian berdasarkan unsur-unsurnya

No	Kelompok Tani	Skor Penilaian				Kat. Pen. NK thd KRP <sup>**</sup>
		NK (a)	NHT T (b)	NH TR (c)	% (a thd b)	
1	Keaktifan anggota	185	291	97	63,57	Cukup
2	Kerjasama Saproton	151	291	97	51,89	Kurang
3	Kerjasama budidaya	97	291	97	33,33	Kurang
4	Kerjasama pan/pasc	97	291	97	33,33	Kurang
5	Kerjasama pemasaran	219	291	97	75,26	Cukup
Jumlah		749	1.455	485	51,48	Kurang

Keterangan : NK = Nilai Kenyataan

2. Unsur kerjasama anggota kelompok tani dalam kegiatan budidaya. Rendahnya kerjasama anggota kelompok tani dalam kegiatan budidaya disebabkan tidak adanya kerjasama antara petani di dalam kelompoknya untuk melakukan budidaya tanaman sehingga petani melakukan budidaya dengan caranya sendiri, baik pada saat melakukan penyiangan, pemupukan, dan pengendalian hama/ penyakit.
3. Unsur kerjasama anggota kelompok tani dalam pemanenan/ pascapanen. Rendahnya kerjasama anggota kelompok tani dalam pemanenan/ pascapanen seperti waktu pemanenan buah sawit dan pengangkutan ke TPH, semua petani melakukannya secara sendiri-sendiri dan terkadang dibantu oleh keluarganya. Hal ini disebabkan petani masih merasa mampu melakukan kegiatan tersebut sehingga petani tidak memerlukan bantuan anggota kelompok lainnya. Kondisi yang demikian seringkali menyebabkan buah sawit yang telah dipanen terlalu lama dibiarkan menumpuk di kebun atau di tempat penumpukan hasil (TPH).

## 2. Kelembagaan Koperasi Unit Desa (KUD)

Hasil analisis diskriptif terhadap kinerja kelembagaan Kelompok Tani pada perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN di Kabupaten Pasir, penilaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.

Berdasarkan katagori penilaian, maka data yang ada pada Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa kinerja kelembagaan KUD pada perkebunan kelapa sawit rakyat di lokasi penelitian baru sampai pada katagori cukup baik. Katagori yang demikian juga dapat dilihat dari besarnya persentase antara total skor NK dengan total skor NHTT dalam arti peran kinerja kelembagaan KUD dalam membentuk keragaan sistem agribisnis adalah sebesar 56,22%.

Ada 11 unsur kelembagaan KUD yang kondisinya masih lemah dalam membentuk kinerja kelembagaan bersangkutan. Unsur-unsur tersebut yaitu :

1. Unsur partisipasi anggota terhadap KUD yang kondisinya masih lemah meliputi : keaktifan anggota dalam KUD, kerjasama anggota di dalam pengelolaan usaha, pembiayaan, pengawasan, dan pemanfaatan KUD. Rendahnya partisipasi anggota terhadap KUD karena umumnya mereka beranggapan bahwa selama ini keberadaan KUD belum banyak memberikan manfaat yang berarti bagi usaha perkebunan. KUD

lebih banyak menyediakan 9 bahan pokok daripada pengadaan *input*/saproton yang dibutuhkan petani. Di samping itu kurangnya adanya nilai tambah yang berarti bagi anggota yang aktif dalam mendapatkan pelayanan KUD, akibatnya anggota yang tadinya aktif menjadi kurang aktif.

Tabel 3. Penilaian kinerja kelembagaan koperasi Unit Desa (KUD) pada perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN di lokasi penelitian berdasarkan unsur-unsurnya

No	Koperasi Unit Desa	NK (a)	Skor Penilaian		% (a thd b)	Kat. Pen. NK thd KRP <sup>45</sup> )
			NHTT (b)	NHT R (c)		
A	Partisipasi Anggota :					
	1. Kaktifan anggota	151	291	97	51,89	Kurang
	2. Kerjs. pengel. Usaha	126	291	97	43,30	Kurang
	3. Kerjs. pembiayaan	115	291	97	39,52	Kurang
	4. Kerjs. pengawasan	140	291	97	48,11	Kurang
	5. Kerjs. pemanfaatan	160	291	97	54,98	Kurang
B	Per. KUD (Saproton)					
	1. Waktu peny. saproton	161	291	97	55,33	Kurang
	2. Kualitas saproton	194	291	97	66,67	Cukup
	3. Jenis saproton	160	291	97	54,98	Kurang
	4. Kecukupan saproton	148	291	97	50,86	Kurang
	5. Tempat peny saproton	194	291	97	66,67	Cukup
	6. Harga saproton	194	291	97	66,67	Cukup
C	Per. KUD (Pemasam)					
	1. Kredit pemasaran	97	291	97	33,33	Kurang
	2. Pent. rendemen TBS	97	291	97	33,33	Kurang
	3. Pent. harga jual	97	291	97	33,33	Kurang
	4. Informasi harga jual	165	291	97	56,70	Cukup
	5. Pembelian TBS	291	291	97	100	Baik
	6. Pengangkutan TBS	291	291	97	100	Baik
Jumlah		2.781	4.947	1.649	56,22	Cukup

2. Unsur peran KUD dalam pengadaan *input* pertanian yang kondisinya masih lemah meliputi : waktu penyediaan saprodi, jenis dan kecukupan saprodi yang disediakan. Masih rendahnya peran KUD dalam pengadaan *input* pertanian disebabkan karena *input* yang disediakan oleh KUD kurang tepat waktu sesuai yang dibutuhkan oleh tanaman. Bagi petani yang mempunyai cukup dana terpaksa berusaha mencarinya ke tempat lain, tetapi bagi yang tidak mempunyai cukup dana terpaksa menunggu tersedianya saproton tersebut di KUD. Selain itu jenisnya saproton kurang banyak tersedia di KUD, sehingga petani tidak mempunyai pilihan lain. Bagi petani yang menginginkan *input* jenis lain terpaksa mencarinya di tempat lain. Hal yang sama juga terjadi terhadap jumlah saproton yang tersedia di KUD dimana jumlah saproton yang ada tidak mencukupi kebutuhan petani. Tidak cukupnya saproton tersebut disebabkan keterbatasan dana yang dimiliki KUD untuk

pengadaannya. Bagi petani yang tidak mendapatkan saprotan di KUD terpaksa mencarinya ke tempat lain walaupun harganya relatif lebih mahal.

3. Unsur peranan KUD dalam pemasaran TBS yang kondisinya masih lemah meliputi : penyediaan kredit pemasaran, penentuan rendemen TBS, dan penentuan harga jual TBS. Masih rendahnya peranan KUD dalam pemasaran TBS, disebabkan pihak KUD ternyata tidak memberikan kredit untuk pemasaran TBS, karena terbatasnya dana yang dimiliki KUD. Begitu juga dengan penentuan rendemen buah sawit pihak KUD tidak berperan dalam hal tersebut disebabkan tidak adanya alat dan pengetahuan/ keterampilan untuk melakukannya di samping kurangnya koordinasi dengan perusahaan inti. Hal yang sama terjadi pada penentuan harga jual TBS pihak KUD tidak turut menentukannya karena harga jual sudah ditentukan oleh perusahaan inti. Tidak adanya peran KUD dalam hal pemberian kredit pemasaran, penentuan rendemen TBS dan penentuan harga jual TBS yang dihasilkan petani menyebabkan posisi petani dalam hal pemasaran TBS berada pada pihak yang lemah.

### 3. Kelembagaan PPL Perkebunan

Hasil analisis diskriptif terhadap kinerja kelembagaan PPL Perkebunan pada perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN di Kabupaten Pasir, penilaiannya dapat dilihat pada Tabel 3

Berdasarkan katagori penilaian, maka data yang ada pada Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa kinerja kelembagaan PPL Perkebunan pada perkebunan kelapa sawit rakyat di lokasi penelitian baru masuk katagori cukup baik. Katagori yang demikian juga dapat dilihat dari besarnya persentase antara total skor NK dengan total skor NHTT dalam arti peran kinerja kelembagaan PPL perkebunan dalam membentuk keragaan sistem agribisnis adalah sebesar 64,26%.

Ada 2 unsur kelembagaan PPL Perkebunan yang kondisinya masih lemah dalam membentuk kinerja kelembagaan bersangkutan. Unsur-unsur tersebut yaitu (1) unsur frekuensi kunjungan, dan (2) lamanya kunjungan PPL Perkebunan. Masih rendahnya kedua unsur tersebut disebabkan luasnya daerah kerja dan banyaknya petani/ kelompok tani yang harus dikunjungi dan dilayani, sementara PPL Perkebunan jumlahnya terbatas, sehingga efektifitas kerja dalam melakukan penyuluhan

dan pembinaan kepada petani kurang terlaksana secara optimal.

Tabel 4. Penilaian kinerja kelembagaan PPL perkebunan pada perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN di lokasi penelitian berdasarkan unsur-unsurnya.

No	PPL Perkebunan	NK (a)	Skor Penilaian			Kat. Pen. NK thd KRP <sup>**</sup> )
			NHTT (b)	NH TR (c)	% (a thd b)	
1	Frekuensi kunjungan	118	291	97	40,55	Kurang
2	Lama kunjungan	140	291	97	48,11	Kurang
3	Materi penyuluhan	223	291	97	76,63	Cukup
4	Pemahaman materi	260	291	97	89,35	Baik
5	Fasilitas penyuluhan	194	291	97	66,67	Cukup
	Jumlah	935	1.455	485	64,26	Cukup*

Interval penilaian :

a. Masing-masing unsur kelembagaan PPL Perkebunan = 64,67

b. Total dari unsur-unsur kelembagaan PPL Perkebunan = 323,33

Kriteria dan katagori penilaian masing-masing unsur kelembagaan PPL Perkebunan :

Kriteria Penilaian (KRP)<sup>\*\*</sup> Katagori Penilaian (KTP)

a. Nilai antara : 97,00 – 161,67 : kurang baik

b. Nilai antara : >161,67 – 226,34 : cukup baik

c. Nilai antara : >226,34 – 291,00 : baik

Kriteria dan katagori penilaian dari total unsur-unsur kelembagaan PPL Perkebunan:

Kriteria Penilaian (KRP)<sup>\*\*</sup> Katagori Penilaian (KTP)

a. Nilai antara : 485,00 – 808,3 : kurang baik

b. Nilai antara : >808,33 – 1.131,66 : cukup baik

c. Nilai antara : >1.131,66 – 1.455,00 : baik

### 4. Kelembagaan Pembina dari Perusahaan Inti

Hasil analisis diskriptif terhadap kinerja kelembagaan Pembina dari Perusahaan Inti pada perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN di Kabupaten Pasir, penilaiannya dapat dilihat pada Tabel 4.

Berdasarkan katagori penilaian, maka data yang ada pada Tabel 5 dapat disimpulkan bahwa kinerja kelembagaan Pembina dari Perusahaan Inti pada perkebunan kelapa sawit rakyat di lokasi penelitian baru masuk katagori cukup baik. Katagori yang demikian juga dapat dilihat dari besarnya persentase antara total skor NK dengan total skor NHTT dalam arti peran kinerja kelembagaan PPL perkebunan dalam membentuk keragaan sistem agribisnis adalah sebesar 60,69%.

Tabel 5. Penilaian kinerja kelembagaan pembina dari perusahaan inti pada perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN di lokasi penelitian berdasarkan unsur-unsurnya

No	Pembina dari Perusahaan Inti	Skor Penilaian				Kat. Pen. NK thd KRP <sup>**</sup> )
		NK (a)	NHT T (b)	NHT R (c)	% (a thd b)	
1	Frekuensi kunjungan	115	291	97	39,52	Kurang
2	Lama kunjungan	112	291	97	38,49	Kurang
3	Materi pembinaan	233	291	97	80,07	Baik
4	Pemahaman materi	213	291	97	73,20	Cukup
5	Fasilitas pembinaan	210	291	97	72,16	Cukup
Jumlah		883	1.455	485	60,69	Cukup <sup>*)</sup>

Sama halnya dengan kelembagaan PPL Perkebunan, pada kelembagaan Pembina dari Perusahaan Inti juga terdapat 2 unsur yang kondisinya masih lemah dalam membentuk kinerja kelembagaan bersangkutan. Unsur-unsur tersebut yaitu (1) unsur frekuensi kunjungan, dan (2) lamanya kunjungan PPL Perkebunan. Masih rendahnya kedua unsur tersebut juga disebabkan luasnya daerah kerja dan banyaknya petani/ kelompok tani yang harus dikunjungi dan dilayani, sementara PPL dan petugas pembina jumlahnya terbatas, sehingga efektifitas kerja dalam melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada petani kurang terlaksana secara optimal.

Berdasarkan data-data dan penilaian masing-masing kelembagaan yang telah dijelaskan di atas, maka secara kumulatif dapat dihitung kinerja kelembagaan yang ada pada perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN di Kabupaten Pasir seperti yang terlihat pada

Berdasarkan kategori penilaian yang ada pada Tabel 6 dapat disimpulkan bahwa kinerja kelembagaan pada perkebunan kelapa sawit rakyat di lokasi penelitian termasuk katagori cukup baik. Katagori yang demikian juga dapat dilihat dari besarnya persentase antara total skor NK dengan total skor NHTT. Hal itu berarti bahwa peran kinerja kelembagaan dalam membentuk keragaan sistem agribisnis yaitu sebesar 57,43 %.

Dari keempat kelembagaan yang diteliti ternyata ada satu lembaga yang kondisinya masih kurang kondusif yaitu kelembagaan Kelompok Tani, sedangkan tiga lembaga lainnya kondisinya baru sampai pada katagori cukup kondusif. Dengan demikian secara kumulatif perannya dalam membentuk keragaan

sistem agribisnis baru sampai pada katagori cukup baik. Masih kurangnya peran dan keterlibatan petani dalam Kelompok Tani menyebabkan pemberian *input* kepada tanaman cenderung tidak sesuai dengan yang dianjurkan, selain rendahnya mutu buah sawit yang dihasilkan. Begitu juga dengan belum optimalnya peran dan partisipasi anggota pada KUD menyebabkan kegiatan KUD tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Keberhasilan KUD tidak hanya ditentukan oleh pengurus dan tersedianya berbagai fasilitas di KUD, tetapi juga tergantung partisipasi anggotanya. Begitu juga dengan masih belum optimalnya peran dan interaksi petani pada PPL-BUN dan Pembina dari Perusahaan Inti menyebabkan selain tidak optimalnya kegiatan penyuluhan dan pembinaan, tetapi yang lebih penting kurang berkembangnya tingkat pengetahuan petani dalam melakukan kegiatan perkebunannya.

Tabel 6. Rekapitulasi penilaian kinerja kelembagaan pada perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN di lokasi penelitian berdasarkan masing-masing kelembagaan

No	Kelembagaan	Skor Penilaian				Kat. Pen. NK thd KRP <sup>**</sup> )
		NK (a)	NHT T (b)	NHT R (c)	% (a thd b)	
1	Kelompok Tani	749	1.455	485	51,48	Kurang
2	Koperasi Unit Desa	2.781	4.947	1.649	56,22	Cukup
3	PPL Perkebunan	935	1.455	485	64,26	Cukup
4	Pembina dari Per. Inti	883	1.455	485	60,69	Cukup
Jumlah		5.348	9.312	3.104	57,43	Cukup <sup>*)</sup>

Interval penilaian = 2.069,33

Kriteria dan katagori penilaian kinerja kelembagaan :  
Kriteria Penilaian (KRP<sup>\*\*</sup>)

Katagori Penilaian (KTP)

a. Nilai antara : 3.104,00 – 5.173,33 : kurang baik

b. Nilai antara : >5.173,33 – 7.242,66 : cukup baik

c. Nilai antara : >7.242,66 – 9.312,00 : baik

## B. Hubungan Antara Kinerja Kelembagaan dengan Keragaan Sistem Agribisnis

Hubungan antara kinerja kelembagaan ( $X_i$ ) dengan keragaan sistem agribisnis di ( $X$ ) berdasarkan hasil analisis, maka hasil uji statistiknya adalah :

$$Z_{H1} = 7,6183$$

Nilai kritis pada  $\alpha = 5\% = +Z_{1/2\alpha} = Z_{0,05} = 1,69$  (kurva normal)

Hipotesis statistik yang diajukan adalah :

$H_0$  = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara  $X_i$  dengan  $X$

$H_1$  = Terdapat hubungan yang signifikan antara  $X_i$  dengan  $X$

$H_0$  diterima bila :  $-1,69 < Z_H < +1,69$

$H_0$  ditolak bila :  $Z_H > +1,69$  atau  $Z_H < -1,69$

Kesimpulan dari hasil uji tersebut yaitu  $H_0$  ditolak karena  $Z_H > +1,69$  hal ini mengisyaratkan terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja kelembagaan ( $X_i$ ) dengan keragaan sistem agribisnis ( $X$ ) pada derajat kekeliruan sebesar 5%. Artinya kinerja kelembagaan pada usaha perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN di Kabupaten Pasir turut menentukan baik tidaknya keragaan sistem agribisnis di tingkat petani. Sedangkan baik tidaknya kinerja kelembagaan tergantung pada unsur-unsur yang menentukan di dalam masing-masing kelembagaan. Apabila unsur-unsur itu kondisinya mampu mendukung kegiatan usaha perkebunan petani, berarti kinerja kelembagaan tersebut memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk keragaan sistem agribisnis perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja kelembagaan merupakan salah satu faktor penting dalam pendukung keberhasilan usaha agribisnis, termasuk keberhasilannya dalam meningkatkan keragaan sistem agribisnis kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN. Hal ini sejalan dengan pendapat Dillon (1994) yang menyatakan bahwa dalam agribisnis mutlak dibutuhkan kelembagaan (*institutional building*) untuk menghindari proses alokasi sumberdaya yang tidak mendorong kepada kesejahteraan petani.. Ditambahkan oleh Mubyarto (1985), bahwa aspek kelembagaan mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan pertanian. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Ajid (1995), bahwa berusahatani hanya bisa berhasil apabila ditunjang oleh perangkat kelembagaan terkait yang ada dan berlaku pada komunitas yang bersangkutan. Pendapat-pendapat yang dikemukakan itu mengisyaratkan bahwa dukungan kelembagaan terhadap usaha perkebunan kelapa sawit rakyat sangat dibutuhkan untuk keberhasilan usaha tersebut. Dukungan dari kelembagaan tidak hanya terbatas pada peran kelembagaan itu sendiri tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keterlibatan petani secara aktif di dalamnya. Jika hal itu dapat dilakukan, maka keberadaan kelembagaan dapat memberikan nilai tambah yang berarti bagi keberhasilan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh petani.

Saran-saran yang perlu dikemukakan dalam upaya meningkatkan keragaan sistem agribisnis pada perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR\_BUN yaitu meningkatkan kinerja kelembagaan Kelompok Tani, Koperasi Unit Desa (KUD), PPL Perkebunan dan Pembina dari Perusahaan Inti, dengan cara meningkatkan unsur-unsur yang masih kurang kondusif pada masing-masing kelembagaan, antara lain :

1. Memberikan pengertian kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani tentang pentingnya bekerjasama dalam penyediaan *input-input* pertanian, kegiatan budidaya, dan kegiatan panen/ pascapanen, serta mengikuti semua kegiatan penyuluhan/ pembinaan dari PPL Perkebunan dan Pembina dari Perusahaan Inti..
2. Meningkatkan partisipasi aktif para petani yang tergabung dalam KUD untuk memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh KUD. Di samping meningkatkan peran KUD dalam memenuhi kebutuhan *input-input* pertanian bagi petani anggotanya, berdasarkan prinsip enam tepat, yaitu tepat waktu, tempat, jenis, jumlah, kualitas, dan harga. Dilain pihak, juga KUD hendaknya menyediakan kredit pemasaran TBS bagi anggotanya, berperan aktif dalam penentuan rendemen dan harga TBS yang dihasilkan oleh petani anggotanya bekerjasama dengan pihak Perusahaan Inti.
3. Meningkatkan frekuensi dan lamanya kunjungan PPL Perkebunan dan Pembina dari Perusahaan Inti, di samping juga menambah jumlah penyuluh dan pembina, memberikan insentif yang lebih memadai serta menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat empat kelembagaan yang turut menentukan keragaan sistem agribisnis perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN di Kabupaten Pasir yaitu (1) Kelompok Tani, (2) Koperasi Unit Desa (KUD), (3) PPL Perkebunan, dan (4) Pembina dari Perusahaan Inti. Kelembagaan itu merupakan salah satu subsistem dalam sistem agribisnis pada perkebunan dimaksud. Namun masing-masing kelembagaan ternyata kontribusinya belum optimal, sehingga dalam mendukung keragaan sistem agribisnis bersangkutan. Bahkan satu di antara empat kelembagaan

- tersebut kinerjanya masih kurang kondusif dalam mendukung keragaan sistem agribisnis. Kelembagaan yang dimaksud adalah Kelompok Tani.
2. Unsur-unsur yang kondisinya masih lemah pada kelembagaan Kelompok Tani yaitu kerjasama anggota kelompok tani dalam penyediaan *input*/saprota, kerjasama anggota kelompok tani dalam kegiatan budidaya, dan kerjasama anggota kelompok tani dalam pemanenan/ pascapanen. Pada kelembagaan Koperasi Unit Desa (KUD) yaitu keaktifan anggota pada koperasinya, kerjasama anggota di dalam pengelolaan usaha, pembiayaan, pengawasan, dan pemanfaatan fasilitas yang disediakan KUD; waktu penyediaan, jenis dan kecukupan saprota yang disediakan KUD; penyediaan kredit pemasaran, penentuan rendemen TBS, dan penentuan harga jual TBS. Sedangkan pada kelembagaan PPL Perkebunan dan Pembina dari Perusahaan Inti menyangkut frekuensi dan lamanya kunjungan.
  3. Kelembagaan sebagai salah satu subsistem agribisnis mempunyai hubungan yang signifikan dengan keragaan sistemnya. Artinya dengan meningkatnya peran kelembagaan merupakan dorongan bagi membaiknya keragaan sistem agribisnis perkebunan kelapa sawit rakyat pola PIR-BUN yang selanjutnya memungkinkan tercapainya keberhasilan yang lebih tinggi dari usaha perkebunan yang dilakukan oleh petani.
- Dillon, J.L. 1994. Hubungan kelembagaan dalam agribisnis. Dalam Kumpulan Makalah Seminar Nasional Memanfaatkan hubungan kelembagaan di bidang agribisnis menghadapi pembangunan Jangka Panjang II pada Lustrum ke-7 Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Mubyarto. 1985. Prospek dan masalah transmigrasi pola PIR-BUN. Makalah Seminar PIR-BUN dalam Rangka Dies Natalis LPP, Yogyakarta.
- Nisjar, Karhi, dan Winardi. 1997. Teori sistem dan pendekatan sistem dalam bidang manajemen. Mandar Maju, Bandung.
- Saleh, S. 1985. Statistik nonparametrik. BPEF, Yogyakarta.
- Siegel, S. 1994. Statistik nonparametrik untuk ilmu-ilmu sosial. diterjemahkan oleh Zanzawi Suyuti dan Lindung Simatupang dalam Koordinasi Pater Hagul. PT. Gramedia, Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian E. 1989. Metode penelitian survei. LP3ES, Jakarta.
- Pakpahan, A. 1989. Perspektif ekonomi institusi dalam pengelolaan sumberdaya alam. EKI 4(XXXVII). 1989 : 445-464.
- Yamane, T. 1967. Elementary sampling theory. Prentice-Hall Inc. Englewood Cliffs.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman. 1982. Ensiklopedia ekonomi, keuangan dan perdagangan. Pradnya Paramida, Jakarta.
- Ajid, Dadung Abdul. 1995. Sketsa sistem agribisnis (pertanian industri) yang melestarikan swasembada beras. Dalam Seminar pertanian tangguh melahirkan industri maju, Kerjasama Universitas Padjadjaran dengan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Komisariat Bandung, Sumedang.
- Al-Rasjid, Harun. 1988. Teknik sampling. Bahan penataran peningkatan kemampuan meneliti dan menyelenggarakan studi kelayakan Staf Pengajar/ Peneliti/Perencana PTS-PTS dan Instansi lainnya, LPPM IKOPIN, Bandung.